



Judul	: Kepala BIN Yakin Akan Tercipta Keseimbangan Harga dan Pasokan Perlahan tapi Pasti, Kisruh Minyak Goreng Akan Segera Reda
Tanggal	: Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 1 dan 8

Kepala BIN Yakin Akan Tercipta Keseimbangan Harga & Pasokan Perlahan Tapi Pasti, Kisruh Minyak Goreng Segera Reda

ANTREAN masyarakat yang mencari minyak serta merta menghilang. Ini menyusul kebijakan pemerintah mengatur ulang objek harga eceran tertinggi (HET) serta kewajiban *domestic market obligation* (DMO) untuk komoditas andalan Indonesia ini, Rabu (16/3).

Dalam kebijakan yang tertuang dalam Permendag Nomor 11/2022 ini, HET untuk minyak kemasan dicabut, sehingga harganya kembali ke nilai keenamian di pasar. Sementara untuk minyak goreng curah, HET ditetapkan Rp14.000 per liter, dan untuk itu dibutuhkan subsidi yang akan ditanggung dari dana kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Perihal DMO, pemerintah memutuskan untuk mencabut dan menggantikannya dengan menaikkan pungutan ekspor agar stok minyak goreng tidak lari ke luar negeri.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

"Akan terdapat keekonomian di mana akan lebih untung untuk menjualnya di dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri. Ini adalah mekanisme pasar, kita berharap dapat menjaga kestabilan nasional, paling tidak, pasokan kepada masyarakat," ujar Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3).

Pertanyaannya, apakah dengan tidak adanya antrean maka kisruh minyak usai? Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengingatkan, kebijakan baru ini butuh waktu untuk benar-benar mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng yang sekitan bulan telah menghantui masyarakat. Selain faktor waktu, kebijakan ini juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang *prudent* di lapangan.

Pada tahap awal, lanjut Budi Gunawan, pencabutan HET pada minyak

kemasan akan memulihkan distribusi di pasar, tapi disertai kenaikan harga yang signifikan. Namun, gejala itu akan segera mereda saat hukum pasar, *supply and demand* berlangsung. Akan ada equilibrium harga ke level wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

"Kuncinya ada pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan tadi. Dengan hilangnya disparitas harga dalam dan luar negeri, produsen akan memilih mendistribusikan produknya di pasar lokal, sehingga volume yang memadai akan memastikan turunnya harga ke level wajar dan bisa diterima masyarakat. Kemudian, dengan HET bersubsidi, minyak curah yang terhitung murah akan turun menyeimbangkan pasokan dan memperbanyak pilihan bagi masyarakat," papar mantan Wakapolri yang akrab disapa BG ini.

Secara simultan, menurut BG, kebijakan baru ini akan dilapis jang

pengaman sosial (social safety net), mengakomodir masyarakat yang tetap belum dapat menjangkau HET. Jaring pengaman sosial ini bisa berupa bansos, BLT, dan berbagai program pendukung lainnya.

Di tempat terpisah, Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Eko Listiyanto mengatakan, HET Rp14.000 untuk minyak curah akan mengatasi kesulitan akses masyarakat ekonomi kelas bawah yang terjadi selama ini di pasar tradisional. Namun, Eko mengingatkan, pemerintah harus benar-benar memastikan minyak curah mengalir ke pasar tradisional; tidak dicegat oleh pemalsu yang mengubahnya menjadi minyak kemasan untuk dijual dengan harga tinggi.

"Jika pengawasan Jebol, kebocoran minyak tersubsidi ini terjadi lagi, misalnya dengan dipalsukan menjadi minyak kemasan atau diselundupkan ke luar, maka kelangkaan pasokan akan kembali terjadi, dan harga minyak goreng secara umum tidak akan bisa dikendalikan," kata Eko.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Sementara itu, untuk memastikan HET bersubsidi Rp14.000 per liter untuk minyak curah bisa segera dilaksanakan, BPDPKS telah menyiapkan alokasi dana Rp7,28 triliun. "Dananya telah kita siapkan, kami menunggu arahan seperti apa metodenya," kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, kemarin. ■ **RCH**

